



STRATEGI KANTOR ATHAN RI DALAM MENANGKAL ISU SEPARATISME PAPUA DI PAPUA NEW GUINEA (STUDI KASUS MELANESIAN SPEARHEAD GROUP)

Andi Yaksan Kamil, Pujo Widodo, Haposan Simatupang

Universitas Pertahanan

Abstrak

Indonesia memiliki pulau dari sabang sampai marauke yang berkewajiban untuk menjaga kedaulatan negara dari segala ancaman luar negeri yang melemahkan NKRI. Maraknya dan munculnya kembali isu seperatis Papua di MSG tidak terlepas dari lobi – lobi politik oleh from pollitom OPM. Untuk meredam isu tersebut, updata yang dapat dilakukan kantor Athan RI dalam rangka melakukan penangkalan terhadap isu separatis Papua di Luar Negeri. Diantaranya dengan meningkatkan hubungan atau diplomasi pertahanan dan militer dengan negara-negara kawasan pasifik Selatan. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini bertujuan untuk memahami intelijen dalam Kerjasama penangkalan isu separatis Papua di Negara-Negara anggota MSG. Mengingat perkembangan separatis papua di negara-negara anggota MSG telah mendapat dukungan. Metode yang digunakan ialah kualitatif deskriptif analitik, kemudian teori yang digunakan ialah teori strategi dan teori diplomasi public. Hasil Penelitian menemukan bahwa Pemerintah Indonesia yaitu Kinerja Athan RI di Papua Nugini telah menunjukkan sikap luar biasa. Berbagai upaya telah ditempuh dengan mengoptimalkan kinerja personel kantor Athan yang ada, meskipun harus disertai duplikasi kerja. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas-tugas yang harus diselesaikan kantor Athan, baik untuk kebutuhan informasi intelijen, kerjasama dengan counterpart dan pembinaan masyarakat Indonesia, serta mendapatkan informasi valid mengenai perkembangan OPM di PNG hingga upaya-upaya peningkatan hubungan dan pengaruh Indonesia dengan Pemerintah PNG. Strategi yang tepat digunakan dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Atase Pertahanan RI-PNG adalah yaitu menerapkan sistem manajemen, dengan memberdayakan staf lokal Kantor Athan yang ada. Disamping itu dapat dengan memperluas jaringan dan membina hubungan dengan counterpart dengan langkah konkritnya melakukan pembentukan jarring.

Kata Kunci: Strategi, Atase Pemerintahan RI-PNG, MSG.

PENDAHULUAN

Melanesian Spearhead Group (MSG) merupakan organisasi sub regional di kawasan Pasifik yang beranggotakan 4 negara, yang berlatar belakang budaya Melanesia seperti Fiji, Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan perwakilan dari Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS) dari Kaledonia Baru. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1988 dengan tujuan untuk mempromosikan dan memperkuat hubungan perdagangan antar anggota, pertukaran budaya Melanesia, tradisi dan nilai, persamaan kedaulatan, serta kerjasama teknik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, good governance, dan keamanan.

Seiring perjalanan waktu, MSG berkembang menjadi organisasi penting dan berpengaruh di kawasan Pasifik. Pada KTT MSG ke-20 di Honiara tahun 2015, Indonesia diterima sebagai anggota Asosiasi dan kelompok West Papua pro kemerdekaan, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendapat status "Observer" sebagai NGO. Pencapaian ini banyak dimanfaatkan oleh orang-orang Papua yang mendukung Organisasi Papua Merdeka untuk mendapatkan dukungan atas pemisahan diri dari NKRI. MSG memang bukanlah ancaman bagi Indonesia tetapi merupakan organisasi sub regional yang dapat menjadi 'kepanjangan lidah' bagi masyarakat Papua yang menghendaki kemerdekaan. Pergerakan OPM yang sebelumnya terpecah-pecah dalam berbagai faksi perlawanan kini semakin terkonsolidasi, solid, dan rapi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Indonesia dalam meredam gerakan

separatis Papua yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Awal kemunculan organisasi Papua Merdeka ini diinspirasi oleh gerakan sejenis pada masa pendudukan Jepang pada 1942-1946. Gerakan perlawanan rakyat Papua Koreri di wilayah Biak dipimpin Angganitha Menafaur. Gerakan Koreri kemudian mengalami penjelmaan dari gerakan kebatinan, menjadi suatu gerakan kemerdekaan bersifat ethno-nasionalis-politis akibat militansi Stephanus Simopyaref, rekan seperjuangan Menafaur. Simopyaref berambisi menyatukan segenap suku dan klan Melanesia ke dalam satu pandangan nasionalisme bangsa Papua

Separatisme yang ada di tanah Papua hingga saat ini masih menunjukkan aktivitas yang semakin tinggi. Keberadaan separatisme dengan ragam istilah seperti Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Kelompok Kriminal Separatisme Bersenjata (KKSB), dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) semua mengacu pada Organisasi Papua Merdeka (OPM). Sebagai organisasi yang didirikan pada tahun 1965 oleh Jacob Prai sekaligus sebagai pemimpin organisasi tersebut memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI.

Isu separatis Papua muncul dikarenakan adanya kelompok yang beraktivitas di suatu daerah untuk mendapatkan pengaruh dan dukungan dari masyarakat dan pemerintah suatu negara. Perkembangan di Indonesia saat ini manuvernya menggunakan front Politik, front Klandestin, front Bersenjata dan front Penggalangan Massa (Kamus Hankam). Terjadinya modernisasi yang keliru yang lebih menonjolkan

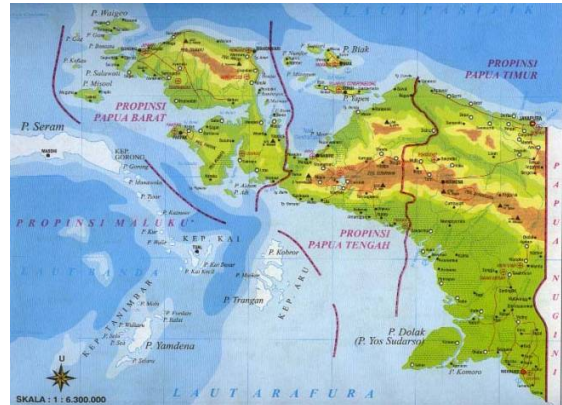
pembangunan fisik dan perubahan sosial budaya menuju Indonesiaisasi yang terlalu dipercepat; Masih adanya rasa sakit hati bekas pendukung Indonesia; Terlalu kuatnya korupsi, kolusi, nepotisme di kedua wilayah itu dan Terlalu lambannya pribumisasi di pemerintahan, baik di Irian Jaya dan Timor Timur (Bhakti, 2009).

Respon daripada Gerakan Papua Merdeka ini sekaligus menjadikan isu Internasionalisasi Papua yang merupakan bagian dari propaganda oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang lahir atas rekomendasi dari Kongres Rakyat Papua II. Isi dari rekomendasi itu salah satunya membentuk tim dengan tugas melobi masyarakat internasional, dan secara khusus meminta bantuan kepada negara-negara di Pasifik Selatan yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group (MSG) dengan membentuk kantor perwakilan OPM diluar negeri, salah satunya di negara Republik Vanuatu.

Usaha Vanuatu memberikan dukungan penuh kepada Papua untuk merdeka dari Indonesia didasari oleh dua kepentingan, yaitu: 13 Pertama, dukungan Vanuatu yang diberikan kepada kemerdekaan Papua adalah bentuk aliansi etnik antar etnik Melanesia. Dekatnya etnis Vanuatu dan Papua menimbulkan rasa emosional antara keduanya, terutama persoalan kekerasan hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Papua. Kedua, berkaitan dengan keinginan Vanuatu menjadi pemimpin regional negara-negara melanesia dengan upaya mendukung Kemerdekaan Papua. Keinginan menjadi pemimpin regional merupakan eksistensi domestik politik Vanuatu. Kelanjutan dari dimensi politik Vanuatu merupakan usaha untuk menegakkan Melanesia Renaissance.

Kemunculan isu separatis Papua ini tidak terlepas dari aspek geografi, demografi dan kondisi sosial masyarakat suatu negara yang memiliki kesamaan.

Aspek Geografi yaitu memiliki kesamaan daerah atau kawasan. Aspek Demografi memiliki kesamaan ras atau etnis, sementara Aspek kondisi sosial masyarakat, memiliki kesamaan dalam hal berperilaku, bertutur kata, adat istiadat, budaya dan lain-lain



Gambar 1.1 Peta Geografis Papua

Sumber: Kritingnews.com

Jika dilihat dari ketiga aspek diatas, kemunculan isu separatis Papua di negara-negara anggota *Melanesian Spearhead Group* (MSG) dapat dirinci yaitu pertama, menempati suatu kawasan yang sama, yaitu subregional Pasifik Selatan; kedua, merupakan masyarakat dari etnis Melanesia; dan ketiga kebudayaan Melanesia yang tersebar dari Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, New Caledonia, hingga Fiji adalah bentuk tradisi tenun, arsitektur rumah, dan pengolahan sagu. Selain itu, mereka terbiasa hidup di pantai dan tidak terbiasa hidup di pedalaman.

Dalam konteks isu pelanggaran HAM di Papua, atase pertahanan RI dapat melakukan beberapa hal, seperti:

- a. Menyampaikan informasi dan data yang akurat tentang situasi dan kondisi di Papua kepada pemerintah dan masyarakat Papua Nugini, serta menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam

- menyelesaikan persoalan Papua secara damai dan adil .
- b. Menjalin hubungan baik dengan media massa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat di Papua Nugini, serta memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan Papua, termasuk isu pelanggaran HAM.
 - c. Menggalang dukungan dan simpati dari negara-negara akreditasi, sahabat dan mitra kerja Indonesia dalam menangani isu Papua, serta menangkali upaya-upaya propaganda dan kampanye negatif yang dilakukan oleh kelompok-kelompok separatis Papua.
 - d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atase pertahanan RI di negara-negara lain, khususnya di kawasan Pasifik, untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama regional dalam menyelesaikan isu Papua.

Tugas Athan (Asisten Atase Pertahanan) dalam menangani isu separatisme Papua adalah untuk membantu Atase Pertahanan dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis situasi keamanan di Papua. Tugas Athan juga membantu dalam membangun hubungan dengan pihak militer dan pemerintah setempat untuk memperkuat kerjasama dalam penanganan isu separatisme Papua. Selain itu, Athan juga bertugas untuk memantau dan melaporkan perkembangan situasi keamanan di Papua kepada pihak yang berwenang di Indonesia.

Semakin terkonsolidasinya perlawanan kelompok separatis Papua ini ditunjukkan dengan pembentukan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang menyatukan faksi-faksi perjuangan OPM antara kelompok bersenjata dan faksi politik. Kehadiran ULMWP dimaksudkan agar upaya memerdekakan Papua lebih terkoordinasi untuk meraih dukungan politik dari masyarakat internasional (Sabir, 2018). ULMWP dideklarasikan pada tanggal 7 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu, dan memiliki tugas utama untuk mengkampanyekan Papua merdeka (*Free West Papua Campaign*) serta melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan dukungan dari berbagai negara, terutama di kawasan Pasifik Selatan.

Dengan digunakan MSG sebagai wadah pergerakan OPM, persoalan Papua lantas tidak lagi terbatas pada urusan domestik, namun telah berkembang menjadi isu internasional. Hal ini tidak terlepas dari peran ULMWP dan negara-negara di kawasan Pasifik Selatan yang secara implisit maupun eksplisit telah memfasilitasi dan membantu proses internasionalisasi isu Papua. Selain itu, kepentingan asing di Papua juga turut andil dalam menarik perhatian dunia atas Papua, yang masing-masing memiliki kepentingan di tanah Papua. Dengan mengusung isu-isu non tradisional seperti HAM dan demokrasi, kampanye Papua merdeka mendapat simpati dari masyarakat internasional khususnya para pegiat HAM. Kelompok separatis Papua bahkan berhasil membuka kantor perwakilan OPM di beberapa negara yaitu, Papua Nugini (Port Moresby), Australia (Perth), Belanda (The Hague), dan Inggris (Oxford), serta Vanuatu (Port Vila) yang secara khusus menjadi lokasi kantor ULMWP. Kendati kampanye Papua Merdeka dilakukan hingga ke Eropa, pusat pergerakan dan konsolidasinya

tetap dipusatkan di kawasan Pasifik. Sebagai dampaknya, beberapa negara di kawasan Pasifik menunjukkan sikap pro terhadap upaya kemerdekaan Papua. Dengan dalih persamaan ras (*Melanesian Brotherhood*), Vanuatu memfasilitasi terbentuknya ULMWP dan menggalang dukungan dari negara Pasifik lainnya untuk kampanye politik Papua Merdeka dengan memanfaatkan organisasi sub regional di kawasan Pasifik, seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG).

Berbagai hal yang menjadikan isu Papua dapat berkembang sebagai konsumsi masyarakat internasional, diantaranya kemampuan diplomasi internasional gerakan separatis yang semakin meningkat dan berhasil, di lain pihak lemahnya kinerja pemerintah dalam menangani dan menyelesaikan isu-isu separatis di dalam negeri hingga kinerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang kurang merespon perkembangan isu Papua. Pada Perwakilan RI di luar negeri atau KBRI / PTRI terdapat Kantor Athan RI yang merupakan satuan pelaksana dibawah Bais TNI yang ditempatkan dengan status Bawah Kendali Operasi (BKO). Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kantor Athan RI dikepalai oleh seorang pejabat militer TNI disebut Atase Pertahanan (Athan). Athan adalah sebuah jabatan di lingkungan kedutaan besar suatu negara atau organisasi internasional lainnya yang mempunyai status diplomat dan biasanya dijabat oleh Perwira Tinggi (Bintang Satu) atau Perwira Menengah (Kolonel). Jabatan ini telah menjadi bagian yang tetap dalam hubungan antara negara-negara di dunia internasional sejak permulaan abad ke-20.

Atase pertahanan RI bertugas untuk memperkuat hubungan pertahanan antara Indonesia dan negara-negara lain. Tugas utamanya adalah mempromosikan kerjasama pertahanan, memperkuat hubungan bilateral, dan memperkuat keamanan

nasional. Dalam mengkonter opini isu-isu Papua Merdeka, Atase pertahanan RI di PNG melakukan berbagai tindakan seperti:

- a. Mengadakan pertemuan: Atase pertahanan RI mengadakan pertemuan dengan para pemimpin dan pejabat pemerintah di PNG yang terlibat untuk membahas isu-isu Papua Merdeka dan memperkuat hubungan pertahanan antara Indonesia dan PNG (PNGDF).
- b. Mengadakan seminar: Atase pertahanan RI dapat mengadakan seminar atau lokakarya untuk membahas isu-isu Papua Merdeka dan memperkuat hubungan pertahanan antara Indonesia dan negara-negara anggota MSG.
- c. Mengadakan kunjungan: Atase pertahanan RI dapat mengadakan kunjungan ke negara-negara yang terlibat untuk memperkuat hubungan pertahanan dan membahas isu-isu Papua Merdeka.

Berpegang pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) a, TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata baik dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Untuk mendeteksi ancaman dari luar, maka TNI menempatkan Atase Pertahanan di luar negeri yang salah satu tugasnya adalah melakukan operasi intelijen terbuka. Melihat pada demikian luas dan pentingnya kedudukan Atase Pertahanan dalam melindungi suatu negara dari ancaman luar negeri, keberadaan Athan Republik Indonesia di luar negeri sudah selayaknya dioptimalkan, karena internasionalisasi

isu separatis Papua dapat digolongkan sebagai ancaman yang datang dari luar. Ancaman tersebut perlu mendapat tanggapan dan respon secara cepat agar tidak berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Indonesia hanya diterima sebagai associate member karena MSG adalah sebuah organisasi yang beranggotakan negara-negara ras Melanesia di Pasifik Selatan, sedangkan Indonesia bukanlah negara Melanesia secara keseluruhan. Indonesia diterima sebagai associate member karena mewakili lima provinsi di Indonesia yang memiliki budaya Melanesia, yaitu Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Indonesia berusaha melakukan pendekatan soft power dengan memberikan bantuan ekonomi, kemaritiman, dan SDM kepada negara-negara MSG, serta meredam propaganda dan kampanye negatif yang dilakukan oleh ULMWP.

Indonesia juga memiliki kepentingan untuk menjalin kerjasama dan komunikasi dengan negara-negara MSG, terutama dalam menangani isu Papua Barat yang mendapat dukungan dari kelompok separatisme ULMWP yang juga menjadi observer di MSG.

Berdasarkan permasalahan latar belakang diatas maka Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana strategi Atase Pertahanan RI dalam menangkal internasionalisasi isu separatisme yang dimainkan Kelompok OPM. Peneliti melihat permasalahan ini sebagai suatu kondisi yang perlu dianalisis, mengingat bahwa Atase Pertahanan RI memegang peranan yang penting dalam menangkal isu separatisme Papua di luar negeri. Oleh karena itu Peneliti akan menggali secara detail terkait strategi Atase Pertahanan RI dalam penangkalan isu separatisme Papua di Papua Nugini dan Negara Kepulauan Pasifik dalam rangka

menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Creswell (dalam Sugiyono, 2014) membagi jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif menjadi 5 bagian, yakni Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, Teori Grounded, dan Naratif. Dan menggunakan data primer dari hasil wawancara dan data sekunder dari Media cetak (Post Courier) dan media sosial (FB).

Penelitian menggunakan metode kualitatif yang mendasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah dimana peneliti berlaku sebagai instrumen kunci. Metode penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu lebih bersifat umum, fleksibel, dinamis, eksploratif, dan mengalami perkembangan selama proses penelitian berlangsung. Pada metode penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif dari partisipan sebagai gambaran yang diutamakan dalam memperoleh hasil penelitian. Penulisan menggunakan Studi Kepustakaan, yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang lebih mendalam, untuk mengembangkan teori, dan untuk mendeskripsikan realitas serta kompleksitas fenomena yang diteliti dengan teknik observasi partisipatoris dan wawancara. Instrumen penelitian yang digunakan berupa buku catatan, alat rekam, dan kapasitas peneliti untuk melakukan interpretasi pada objek penelitian.

Dalam tulisan ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian *case study*

atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (*given*). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian *case study* merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya (Danim, 2002).

Untuk melakukan studi kasus Robert K. Yin (2011) menganjurkan kasus yang diangkat signifikan mengisyaratkan sebuah keunikan dan betul-betul khas. Selain itu, studi kasus harus lengkap dengan ciri-ciri memiliki batas yang jelas, tersedia bukti yang relevan dan mempermasalahkan ketiadaan kondisi buatan, mempertimbangkan alternatif perspektif (*anomaly*), menampilkan bukti yang memadai dan laporan harus ditulis dengan cara menarik dan menggugah. Keunikan harus mencakup :

- a. ciri khas/hakikat kasus
- b. latar belakang historis
- c. konteks/setting fisik
- d. konteks lain, mencakup ekonomi, politik, hukum dan estetika
- e. kasus-kasus lain yang dengannya suatu kasus dapat dikenali
- f. para informan yang menjadi sumber dikenalnya kasus.

Selanjutnya Yin menyarankan 5 (lima) komponen penting dalam mendesain studi kasus, yaitu :

- a. pertanyaan-pertanyaan penelitian

- b. proporsi penelitian, hal yang harus diteliti
- c. unit analisis penelitian
- d. logika yang mengaitkan data dengan proposisi, dan
- e. kriteria menginterpretasi temuan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami strategi intelijen dalam kerjasama penangkalan isu separatis Papua di negara-negara anggota MSG. Mengingat perkembangan separatis Papua di negara-negara anggota MSG telah mendapat dukungan.

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik kepustakaan, Menurut Koentjaraningrat teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Sejalan dengan pendapat tersebut, Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

Subjek penelitian adalah sesuatu baik orang, ataupun benda yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Pada subjek penelitian disini adalah para informan yang dianggap berkompetensi dan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan metode yang diambil. menjadi sumber data primer. Pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu dengan

mengidentifikasi partisipan berdasarkan kriteria tertentu.

Landasan Teori

Optimalisasi

Menurut Poerwadarminta (Ali, 2014) optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (Ali, 2014) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam pewujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Dengan teori optimalisasi menurut beberapa ahli tersebut maka adanya kerjasama yang dijalin antar aparat intelijen 2 (dua) negara dapat dicapai hasil maksimal sesuai yang diharapkan yaitu dapat mengantisipasi dan merespon secara cepat dan tepat munculnya isu separatis Papua di negara-negara subregional Pasifik Selatan (MSG).

Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai (per individu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dapat dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat.

Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi yang digerakan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut¹¹. Ada berbagai pendapat tentang kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Rue dan Byars, menyatakan bahwa kinerja adalah sebagai tingkat pencapaian hasil. Kinerja menurut interplan berkaitan dengan operasi, aktivitas, program dan misi organisasi. Murphy dan Cleveland, menyatakan bahwa kinerja adalah kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan. Ndraha, menyatakan bahwa kinerja adalah manifestasi dari hubungan kerakyatan antara masyarakat dengan pemerintah. Sedangkan Widodo, menyatakan bahwa kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Konsep kinerja yang dikemukakan oleh LAN-RI lebih mengarahkan kepada acuan kinerja suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi publik yang cukup relevan sesuai dengan strategi suatu organisasi yakni dengan misi dan visi yang lain yang ingin dicapai.

Teori Penangkalan

Sejarah penangkalan telah lama melibatkan instrumen kekuatan militer dan diplomatik. Penangkalan dilaksanakan dengan mencoba meyakinkan lawan bahwa serangan yang dibangun olehnya akan sia-sia belaka. Contoh China dengan tembok raksasanya, tembok Roma di Inggris, dan konsep keseimbangan kekuatan dan kebijakan supremasi Maritim Inggris, contoh seperti ini dan mungkin lainnya yang serupa – bukti bahwa defensif adalah memelihara status-quo. Tembok

raksasa China tidak pernah menyerang siapapun, juga kekuatan maritim Inggris tetap memegang teguh karakter defensifnya bahkan dalam perang dunia-I. Mereka membuktikan penangkalan telah berhasil dilakukan. Penangkalan sekarang lebih memiliki fitur yang terbaru, khususnya kebutuhan melakukan penangkalan dan terpenting (necessary condition) tidak boleh gagal sama sekali (serangan Jepang ke Pearl Harbor adalah penangkalan yang

Separatisme

Separatis adalah suatu gerakan yang bersifat mengacau dan menghancurkan yang dilakukan oleh gerombolan pengacau yang bertujuan untuk memisahkan diri dari ikatan suatu negara. (Abdul Qadir Djaelani: 2001). Dalam sebuah bangsa atau kelompok selalu saja ada orang atau golongan tertentu yang ingin dan berupaya untuk memisahkan diri dari bangsa atau kelompoknya dengan berbagai alasan untuk mendapatkan dukungan. Orang atau kelompok ini disebut dengan istilah kaum separatis. Mereka berupaya untuk mendapatkan kedudukan sebagai bangsa atau kelompok yang merdeka. Contoh yang ada di negara kita Indonesia, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS), Operasi Papua Merdeka (OPM) dan lain sebagainya. Apapun maksud dan tujuan kaum pemberontak termasuk di dalamnya kaum separatis, merupakan perbuatan melanggar hukum nasional negara setempat. Hal ini dikarenakan perbuatan separatis merupakan pemaksaan kehendak kepada pemerintah yang sah dalam rangkai mencapai tujuan yang diyakininya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Athas Kerjasama dengan Pihak-Pihak Luar

Kerjasama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan orang lain secara keseluruhan

dan menjadi bagian dari kelompok dalam memecahkan suatu permasalahan.

Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh atase pertahanan RI antara lain:

- a. Menyampaikan informasi dan data tentang kebijakan, program, dan kegiatan pertahanan Indonesia, serta menjelaskan posisi dan sikap Indonesia terkait isu-isu strategis di kawasan dan dunia.
- b. Menjalin hubungan baik dengan media massa, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan tokoh-tokoh masyarakat, serta memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan Indonesia, termasuk isu pelanggaran HAM, terorisme, dan separatisme.
- c. Menggalang dukungan dan simpati dari negara-negara sahabat dan mitra kerja Indonesia dalam menangani isu-isu pertahanan yang menjadi kepentingan bersama, serta menangkal upaya-upaya propaganda dan kampanye negatif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin merusak hubungan bilateral atau multilateral.
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan atase pertahanan RI di negara-negara lain, khususnya di kawasan yang memiliki keterkaitan strategis dengan Indonesia, untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama regional dalam menyelesaikan isu-isu pertahanan yang bersifat lintas batas.

- e. Menjajaki dan mengembangkan kerjasama di bidang industri pertahanan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan pelatihan, pasukan pemelihara perdamaian, dan bidang-bidang lain yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan pertahanan Indonesia.

Optimalisasi kinerja Kantor Atase Pertahanan RI di PNG dalam rangka kesiapan menangkal isu separatis Papua di MSG.

Terpenuhinya jumlah SDM sesuai kuantitas yang dikehendaki dalam pelaksanaan tugas-tugas kantor Athan, maka optimalisasi kinerja kantor tersebut akan dapat ditingkatkan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja baik secara internal maupun eksternal kantor Athan. Secara internal, kegiatan administrasi, evaluasi obyek kerja, analisa dan tugas-tugas lain di dalam kantor Athan akan terlaksana. Dampaknya setiap kegiatan akan memiliki target yang harus dicapai. Pencapaian target didasarkan pada analisa yang telah dibuat. Begitu seterusnya hingga tiap-tiap tugas yang dibebankan kepada kantor Athan RI dapat dipenuhi.

Adanya peluang, kendala, kekuatan dan kelemahan yang menjadi faktor berpengaruh terhadap upaya mengoptimalkan kinerja kantor Athan dalam menangkal munculnya isu separatis Papua, maka dapat dibuat analisa untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat dimanfaatkan atau justru menjadi penghambat optimalisasi kinerja kantor Athan yang harus diatasi. Karena dengan tidak teratasinya hambatan tersebut maka selamanya akan menjadi ancaman. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1 Analisa SWOT terhadap optimalisasi kinerja

Strength - UU No.34 / 2004 - TNI. - UU No.3 / 2002 - Hanneg - Jati diri Prajurit	Weakness - SDM - Anggaran - Prasarana pendukung
Opportunity - Kepercayaan internasional. - Potensi dagang dan ekonomi.	Threat - Peraturan dan hukum lintas negara - Duk pol dan jak kam neg akreditasi - Luas wilayah monitoring

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Tabel 4.2 Tabel Analisis SWOT

SW	Strength	Weakness
OT	- UU No.34/2004 - UU No.3/2002 - Jati diri prajurit	- SDM - Anggaran - Prasarana pendukung.
Opportunity	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
- Kepercayaan Internasional - Potensi dagang ekonomi	Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
Threat	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
- Peraturan hukum lintas negara - Dukpol dan jak kam neg akreditasi - Luas wilayah	Menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi kendala	Menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan mengatasi kendala

Sumber: diolah oleh peneliti, 2021

Prosedur pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT yang terdiri dari analisis internal dan eksternal, digunakan untuk menentukan dan menganalisis optimalisasi kinerja kantor Athan yang dimaksud di atas, karena faktor-faktor internal dan eksternal memiliki tingkat kohesi dan kombinasi yang tinggi untuk saling mempengaruhi. Setidaknya ada tiga hal penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan upaya optimalisasi kinerja Kantor Athan, yaitu:

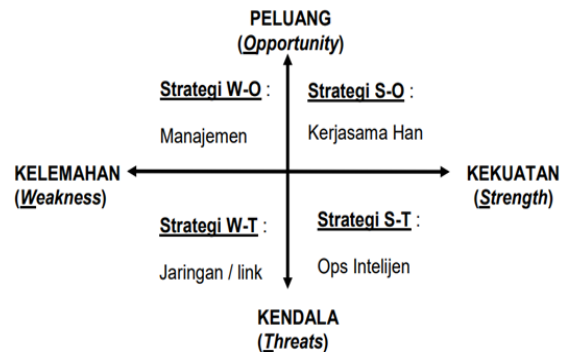
- a. Upaya yang dilakukan harus konsisten dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang dinamis, khususnya upaya tersebut harus dapat mengambil keuntungan dari

peluang yang ada atau yang diproyeksikan dan meminimalkan pengaruh dari ancaman utama.

- b. Upaya optimalisasi kinerja kantor Athan juga perlu harus menempatkan persyaratan yang realistis dari kemampuan internal Kantor Athan. Dengan kata lain pengejaran peluang harus berdasarkan pada eksistensi dari peluang dan kekuatan internal Kantor Athan.
- c. Upaya-upaya tersebut harus secara hati-hati dilaksanakan. Hal ini dilakukan agar optimalisasi kinerja kantor Athan yang diterapkan dapat berguna dalam menyiapkan data-data intelijen secara cepat dan tepat serta tidak menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks lagi di masa yang akan datang. Dalam artian strategi harus memperhitungkan seluruh aspek secara komprehensif agar hasil dapat dicapai dengan optimal.

Analisa SWOT ini digunakan sebagai alat untuk menganalisa tentang permasalahan terkait optimalisasi kinerja kantor Athan dalam menangkali isu separatist Papua di MSG, yang memberikan gambaran mengenai upaya yang dapat dilakukan kantor Athan. Oleh karena itu perlu ditemukan upaya berdasarkan analisa situasi, baik internal maupun eksternal dari masing-masing komponen optimalisasi kinerja Kantor Athan. Analisis SWOT ini akan berupaya meng-capture permasalahan dalam sudut pandang yang lebih komprehensif agar menemukan strategi yang paling ideal didasarkan pada berbagai kondisi faktual yang ada di lapangan. Analisa SWOT digunakan agar didapat strategi terbaik dalam pemecahan persoalan.

Analisis SWOT dapat digambarkan dengan menggunakan diagram sebagai berikut:



- 1) Strategi SO digunakan untuk mengantisipasi situasi yang paling menguntungkan; dimana organisasi menghadapi beberapa peluang lingkungan dan mempunyai berbagai kekuatan yang mendorong peluang tersebut.
- 2) Strategi ST digunakan untuk mengantisipasi suatu kondisi dimana suatu organisasi dengan kekuatan utama menghadapi suatu lingkungan yang tidak menguntungkan.
- 3) Strategi WO digunakan untuk mengantisipasi suatu kondisi dimana organisasi memiliki peluang besar yang impresif akan tetapi dihambati oleh kelemahan internal.
- 4) Strategi WT digunakan untuk mengantisipasi situasi yang paling tidak menguntungkan dengan organisasi menghadapi ancaman lingkungan pada suatu posisi yang relatif lemah secara internal.

Dari kedua tabel strategi diatas yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Atase Pertahanan RI-PNG dalam menangkali isu

separatis Papua di MSG adalah metode Strategi yang berbasis W-O. Kondisi ini yang paling menguntungkan bagi Kantor Athan dalam mengoptimalkan kinerjanya. Strategi ini dilakukan melalui upaya meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang dinilai oleh peneliti mampu meningkatkan potensi pencapaian tugas pokok satuan. Upaya memanfaatkan peluang yang dimiliki dilakukan dengan cara memanfaatkan adanya kepercayaan masyarakat internasional dan potensi perekonomian yang kita miliki sangat memberikan manfaat terhadap pencapaian kinerja. Sebagai langkah nyata dari Strategi W-O yaitu dengan menerapkan manajemen.

Untuk itu manajemen dapat mengambil alih agar peningkatan kinerja kantor Athan dapat terwujud. Strategi ini sangat berkaitan dengan kemampuan dan keahlian pejabat sebagai sumber daya pendukung yang berkualitas sehingga optimalisasi kinerja Kantor Athan dapat berhasil dan optimal. Kualitas sumber daya pendukung yang dimaksud terdiri dari dua hal, yaitu sumber daya manusia maupun sarana-prasarana lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan peningkatan kinerja kantor Athan. Manajemen sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting yang dimainkan oleh sumber daya manusia dalam suatu organisasi yang menuntut pengelolaan sumber daya manusia yang semakin efektif sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan profesionalisme dalam bidang manajemen personalia dan manajemen sumber daya manusia dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan bisnis atau sebagai suatu mekanisme pengintegrasian antara kebijakan-kebijakan perusahaan dengan penerapannya dalam mengelola sumber daya manusia dan kaitannya dengan strategi organisasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan suatu strategi dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Perencanaan sumber daya manusia dimulai dalam setiap aktivitas/fungsi operasional sumber daya manusia (SDM) mulai dari proses penarikan, seleksi, pelatihan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial, hingga pemutusan hubungan kerja, yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi produktif dari sumber daya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan organisasi secara lebih efektif dan efisien.

Dalam konteks kualitas sumber daya manusia, butuh proses panjang penempatan untuk menjadi SDM yang memiliki kualitas dalam menjalankan fungsi manajemen. Kemampuan melakukan analisa terhadap suatu masalah yang dihadapi oleh organisasi akan menjadikan SDM tersebut bernilai jual tinggi. Karena dengan kemampuan yang dimiliki SDM tersebut dapat melakukan pekerjaan atau kegiatan yang dapat mengurangi kelemahan dan kendala serta mengoptimalkan kekuatan untuk meningkatkan kinerja. SDM seperti inilah yang seharusnya menjadi pelaku dalam meningkatkan kinerja kantor Athan RI di PNG. Memang kondisi saat ini masih terlihat adanya kekurangan SDM dihadapkan pada TOP/DSPP kantor Athan di PNG. Melihat pada kelemahan yang saat ini dihadapi oleh Kantor Athan dalam rangka mengoptimalkan kinerjanya, maka jalan pintas yang dapat ditempuh adalah memberdayakan personel yang ada serta menerapkan strategi W-T dengan konkritnya melakukan pembentukan jaring.

Pentingnya Melakukan Langkah Strategi Indonesia menjadi Full Member MSG

Full member MSG memiliki hak suara dan pengaruh yang lebih besar dalam organisasi, dibandingkan dengan associate member yang hanya memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan MSG tanpa hak suara. Full member MSG juga dapat menikmati manfaat kerjasama yang lebih luas dan mendalam di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan dengan negara-negara Melanesia lainnya.

Associate Member dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan di MSG dan mengajukan permintaan menyampaikan statement selama disetujui secara konsensus oleh seluruh MSG full members. Indonesia juga memiliki akses terhadap dokumen yang bersifat confidential. Sedangkan, kewajiban sebagai Associate Member adalah memberikan kontribusi tahunan pada Sekretariat MSG.

Indonesia sebagai associate member MSG, masih harus berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari full member MSG, terutama dalam menangani isu Papua Barat yang menjadi sorotan internasional.

Upaya Menangkal Isu Pelanggaran HAM di Papua

Sebagai langkah kongkrit dari Strategi S-O yaitu dengan menerapkan kerjasama pertahanan. Menurut Thomson dan Perry, pengertian kerjasama adalah suatu kegiatan yang memiliki tingkatan yang berbeda mulai dari adanya koordinasi dan kooperasi hingga terjadi kolaborasi di dalam suatu kegiatan kerjasama.

Kerjasama RI dengan Papua Nugini dalam menangkal isu separatisme Papua adalah kerjasama yang bersifat politik, ekonomi, sosial, budaya,

pertahanan, dan keamanan. Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan antara lain:

- a. Menandatangani perjanjian kerja sama pertahanan pada tahun 2010, yang mencakup pertukaran personil, intelijen, latihan bersama, operasi koordinasi, dan penyelesaian sengketa secara damai 13.
- b. Memberikan dukungan dan bantuan kepada Papua Nugini dalam pelaksanaan konferensi APEC pada tahun 2018, termasuk bantuan pengamanan 24.
- c. Menjalin hubungan baik dengan pemerintah dan masyarakat Papua Nugini, serta menjelaskan posisi dan sikap Indonesia terkait isu Papua Barat di forum internasional, seperti PBB dan organisasi regional 12.
- d. Mendorong Papua Nugini untuk membujuk negara-negara tetangganya di kawasan Pasifik, seperti Vanuatu, agar tidak mendukung gerakan separatisme Papua Barat 1.
- e. Mengelola perbatasan darat dan laut yang panjang dan strategis, serta menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan Papua Barat, seperti masalah pengungsi, perdagangan ilegal, dan keamanan 124.

Gagasan inovasi

Berangkat dari kendala dan kelemahan yang dihadapi Kantor Athan maka gagasan inovasi yang dapat diberikan dalam mengatasi kondisi tersebut antara lain:

- a. Perlu dilaksanakan dialog pertahanan diluar Analist to Analist Excahnge (ATAX) yang membahas khusus

operasi dan kegiatan TNI dan Papua New Guinea Defence Force (PNGDF) yang melibatkan Mabes TNI, dimana kantor Athan RI juga ikut terlibat di dalamnya.

- b. Perlu pembaruan SOFA (Status of Force Agreement) di PNG, agar TNI bisa melakukan sejenis operasi militer bersama dengan PNGDF di wilayah perbatasan RI-PNG guna melakukan pengejaran OPM di camp-camp mereka, meminimalisir aktivitas separatist Papua di daerah Vaimo serta, atau menekan aktivitas OPM di wilayah dalam negeri PNG.
- c. Perlu menempatkan Liaison Officer (LO) di Vaimo guna membantu kantor Athan dalam sharing informasi dan koordinasi dengan pihak Konsulat RI Vaimo serta pemantauan terhadap aktivitas OPM di wilayah Vaimo dan Western province.
- d. Perlu adanya suatu operasi kontra dan penggalangan di Pasifik Selatan yang dilakukan oleh Bais TNI dan BIN dalam rangka merubah ESTOM tokoh politik, anggota Parlemen/Kongres, pejabat negara yang pro kemerdekaan Papua dan mengkonter isu separatist yang berkembang di MSG yang dilakukan oleh aktor non state serta melawan opini masyarakat PNG yang sudah terkooptasi oleh media-media lokal.

Diplomasi pertahanan RI dengan PNG adalah salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani isu Papua, khususnya terkait dengan gerakan separatist yang mendapat dukungan dari sebagian negara-negara Pasifik Selatan. Konsep diplomasi pertahanan RI dengan PNG meliputi beberapa aspek, antara lain:

- a. Membangun hubungan kerjasama pertahanan dan keamanan yang saling menguntungkan, termasuk di bidang pertukaran intelijen, latihan bersama, bantuan militer, dan peningkatan kapasitas¹².
- b. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam menanggapi isu-isu regional dan global yang berdampak pada stabilitas dan keamanan kedua negara, seperti terorisme, perompakan, penyelundupan, dan bencana alam¹².
- c. Menjaga hubungan baik dan saling menghormati kedaulatan dan integritas teritorial kedua negara, serta tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing¹².
- d. Mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, baik melalui program pemerintah maupun kerjasama antar-masyarakat sipil, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan¹².

Kinerja kantor Athan RI di Papua Nugini telah menunjukkan sikap yang luar biasa. Hal ini tidak terlepas dari kondisi sumber daya manusia yang sangat terbatas dalam menjalankan

KESIMPULAN REKOMENDASI DAN PEMBATASAN

tugas-tugas Atase Pertahanan dalam rangka menjalin hubungan, meningkatkan pengaruh Indonesia di kawasan subregional Pasifik Selatan. Meski dalam kenyataan masih ditemukan bermunculannya isu-isu separatis Papua di wilayah tersebut. Berbagai upaya telah ditempuh dengan mengoptimalkan kinerja personel kantor Athan yang ada, meskipun harus disertai duplikasi kerja. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tugas-tugas yang harus diselesaikan kantor Athan, baik untuk kebutuhan informasi intelijen, kerjasama dengan counterpart dan pembinaan masyarakat Indonesia, serta mendapatkan informasi valid mengenai perkembangan OPM di PNG hingga upaya-upaya peningkatan hubungan dan pengaruh Indonesia dengan Pemerintah PNG. Strategi yang tepat digunakan dalam mengoptimalkan kinerja Kantor Atase Pertahanan RI-PNG adalah yaitu menerapkan sistem manajemen, dengan memberdayakan staf lokal Kantor Athan yang ada. Disamping itu dapat dengan memperluas jaringan dan membina hubungan dengan counterpart dengan langkah konkritnya melakukan pembentukan jarring.

Maraknya dan munculnya kembali isu separatis Papua di MSG tidak terlepas dari lobi-lobi politis yang dilakukan oleh front politik OPM dan adanya support dari aktor state dan non state. Untuk meredam isu tersebut, upaya yang dapat dilakukan Kantor Athan RI dalam rangka melakukan penangkalan terhadap isu separatis Papua di Luar negeri, diantaranya yaitu meningkatkan hubungan atau diplomasi pertahanan dan militer dengan negara-negara kawasan Pasifik Selatan. Utamanya dengan PNG sebagai negara terbesar dan dianggap sebagai Big Brothers di etnis Melanesia dan memiliki pengaruh dominan di kawasan tersebut. Selain itu, secara geografis PNG berbatasan darat dan laut dengan Indonesia di Provinsi Papua. Kondisi ini

mengharuskan Pemerintah untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan berbagai tujuan, yang salah satu dari tujuan tersebut adalah meredam maraknya isu Papua di PNG. Strategi yang tepat digunakan dalam menangkal berkembangnya isu separatis Papua di MSG adalah dengan menerapkan kerjasama pertahanan. Disamping itu, untuk mengatasi kendala yang ada dapat dilakukan dengan cara melaksanakan operasi intelijen. Adapun maksud dan tujuannya, yaitu menangkal penyebaran isu separatis Papua yang kian gencar dilakukan oleh kelompok front Politik OPM di Pasifik Selatan dalam rangka internasionalisasi Papua merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Adriana Elisabeth. "Dimensi Internasional Kasus Papua", Jurnal Penelitian Politik, Vol.3, No.1, 2006, Hlm. 45.

Ahmad Sobir, Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. (Jurnal Hubungan Internasional, XI No.1, 2018)

Amstrong dan Baron dalam Irham Fahmi. (2011) Manajemen Kinerja. Bandung: Alfabeta. Hlm. 2.

Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Danim, Sudarwan. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia.

Decky Wospakrik, S.H., Gerakan Separatisme di Papua mengurai konflik dan solusi penyelesaian Papua- Jakarta, Universitas Cenderawasih, hal.1.

Gia Noor Syah Putra, dkk. 2019. Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Negara-Negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) Dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus Negara Republik Vanuatu. Jurnal Peperangan Asimetris.

Harbani Pasolong (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta, CV.

Andi Yaksan Kamil, Pujo Widodo, Haposan Simatupang

Strategi Kantor Athan Ri Dalam Menangkal Isu Separatisme Papua Di Papua New Guinea...(Hal 1250-1265)

https://kemlu.go.id/portal/id/read/128/halaman_list_lainnya/melanesian-spearhead-group-msg

<https://kritingnews.blogspot.com/2009/09/papua-barat-adalah-tanah-adat.html>

<https://www.pelajaran.co.id/pengertian-kerjasama/>

<https://sosiologis.com/pendekatan-penelitian>, diakses 29 Maret 2020.

Irham Fahmi (2011). Manajemen Kinerja. Bandung Alfabeta. Hlm. 2.

Kamus Istilah Hankam Jilid I, disadur oleh Zamzani, Karlis, hal 4

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat. (Jakarta. Gramedia. 1983). Hlm 480.

Mardalis dalam Abdi Mirzaqon T, Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori Dan Praktik Konseling Expressive Writing, <https://media.neliti.com/media/publications/53525-studi-kepuustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>

Nusa Bhakti, Ikrar, Reformasi dan Separatisme, <http://www.tempo.co.id/ang/min/03/22/kolom2.htm>, diakses tanggal 19 Oktober 2009, Jam 19.45

Rahardjo Adsasmita (2011) Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm 92.

Raymond Noe, Manajemen Sumber Daya Manusia Mencapai Keunggulan Bersaing. (Jakarta: Salemba Empat, 2010) Hlm 67 Robert K Yin, (2011), Qualitative Research from Start to Finish, The Guilford Presss, New York, London

Rivai Veithzal, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.) hlm 45

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B. (Bandung: Aflabeta. 2015). Hlm.45

Thomas Bagus Putera Temaluru. Kepentingan Vanuatu Dalam Pemerdekaan Papua. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, Vol. 5 No.2, 2016.

Truman Simanjuntak dalam Mahandis Yoanata Thamrin, <https://nationalgeographic.grid.id/read/131736895/migrasi-manusia-dan-perjalanan-sejarah-melanesia-di-indonesia?page=all>, diakses 21 Mei 2020.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 pasal 6 ayat (1) a, TNI sebagai alat pertahanan negara

Wahyuni, Sari, Qualitative Research Method: Theory and Practice, (Jakarta: Salemba Empat, 2012).

Yin, Robert K. 2011. Qualitative Research from Start to Finish. New York: The Guilford Press.